

ILKJ

Laporan Kinerja

2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**

JL.H AGUS SALIM NO.2 KOTA BARU
TELP.(0741)446726, FAX (0741) 446721
JAMBI, 36137



Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Januari 2024
KEPALA DINAS,

J. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1 004

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Januari 2024
KEPALA DINAS,

Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut

1. Sasaran meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap, dengan indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, mempunyai target sasaran Kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 83,23%, dan memperoleh Capaian kinerja Dinas PUPR sebesar 78,99%.
2. Sasaran berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya memiliki 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
 - a. Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 49,61%, dan memperoleh capaian Kinerja Dinas PUPR Sebesar 49,04% tahun 2023.
 - b. Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 86,01% dan memperoleh capaian Kinerja Dinas PUPR sebesar 62,80 % tahun 2023.
3. Sasaran penurunan lingkungan kumuh, dengan indikator persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2023 adalah 172 Ha, dan memperoleh capaian kinerja Dinas PUPR sebesar 0 Ha.
4. Sasaran meningkatnya penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi dengan indikator persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi, mempunyai target sasaran kinerja pada tahun

2023 adalah sebesar 25 %, memperoleh capaian kinerja Dinas PUPR sebesar 45 %.

5. Sasaran tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses dengan indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 79,08%, dan memperoleh capaian kinerja Dinas PUPR sebesar 79,19%.
6. Sasaran penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dengan indikator rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli mempunyai target sasaran kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 47 %, dan memperoleh capaian kinerja Dinas PUPR sebesar 47%.
7. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik meliputi target kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 91,6% dengan pencapaian kinerja Dinas PUPR tahun 2023 sebesar 91,3%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi bagi Dinas PUPR Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.
2. Perlunya peningkatan kinerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu-Isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	8
1.6 Keuangan	9
1.7 Sistematika LKj IP	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	12
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	14
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	21
2.3.1 Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	21
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	22
2.4 Instrumen Pendukung	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
3.3 Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	59
Lampiran 1 Matriks Renstra 2021-2026 (Tujuan/Sasaran)	59
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	62
Lampiran 3 Matriks Pengukuran Kinerja	65
Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya	67
Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima	76
Lampiran 6 Lembar Perhitungan Capaian Kinerja	82
Lampiran 7 Lembar Perhitungan Realisasi Kinerja Per Sasaran	85
Lampiran 8 Lembar Perhitungan Realisasi Anggaran Belanja Per Sasaran	88
Lampiran 9 Lembar Perhitungan Analisis Efisiensi	91

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.....	8
Tabel 1.2	Aset lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023	8
Tabel 2.1	Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026....	13
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	15
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
Tabel 2.5	Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2023.....	22
Tabel 2.6	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023.....	22
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023.....	25
	Tabel 3.2.1 Capaian Realisasi Kinerja pada sasaran Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2023.....	27
	Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja pada sasaran Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap 3 tahun terakhir Tahun 2021- 2023.....	27
	Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Terhadap Target RPJMD.....	29
	Tabel 3.2.4 Capaian Realisasi Kinerja Pada Sasaran Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Tahun 2023.....	31
	Tabel 3.2.5 Capaian Kinerja pada sasaran Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya 3 tahun terakhir Tahun 2021-2023	32
	Tabel 3.2.6 Capaian Kinerja pada Sasaran Berfungsinya Jaringan Irigasi,Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Terhadap Target RPJMD.....	34
	Tabel 3.2.7 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Penurunan Lingkungan Kumuh Tahun 2023.....	35
	Tabel 3.2.8 Capaian Kinerja pada Sasaran Penurunan Lingkungan Kumuh 3 tahun terakhir Tahun 2021-2023.....	36
	Tabel 3.2.9 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Tahun 2023.....	37
	Tabel 3.2.10 Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 3 tahun terakhir Tahun 2021-2023.....	38
	Tabel 3.2.11 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses Tahun 2023.....	39
	Tabel 3.2.12 Capaian Kinerja pada Sasaran Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses 3 tahun terakhir tahun 2021-2023	40
	Tabel 3.2.13 Capaian Kinerja pada Sasaran Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat Untuk Mendukung Universal Akses Terhadap Target RPJMD.....	41
	Tabel 3.2.14 Capaian Kinerja pada Sasaran Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat Terhadap Capaian Nasional.....	41
	Tabel 3.2.15 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun 2023.....	43
	Tabel 3.2.16 Capaian Kinerja pada Sasaran Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 3 tahun terakhir tahun 2021-2023.....	43
	Tabel 3.2.17 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2023.....	46
	Tabel 3.2.18 Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 3 tahun terakhir tahun 2021-2023.....	46

Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023.....	48
Tabel 3.4	Daftar Paket Pekerjaan Tidak Terealisasi dan Tunda Bayar T.A 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.....	49
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023	54

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Jambi.....	2
Gambar 1.2	Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023.....	5
Gambar 1.3	Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Golongan di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023	6
Gambar 1.4	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023.....	7
Gambar 1.5	Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR Provinsi Jambi.....	7
Gambar 3.1	Grafik Realisasi Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	28
Gambar 3.2	Grafik Realisasi Persentase Tercapainya Kualitas Pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan.....	33
Gambar 3.3	Grafik Realisasi Persentase Luas Baku Daerah Irigasi yang Terairi.....	33
Gambar 3.4	Grafik Realisasi Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh.....	36
Gambar 3.5	Grafik Realisasi Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi	38
Gambar 3.6	Grafik Realisasi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan.....	40
Gambar 3.7	Grafik Realisasi Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli.....	44
Gambar 3.8	Grafik Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	47

BAB 1

Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-isu strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

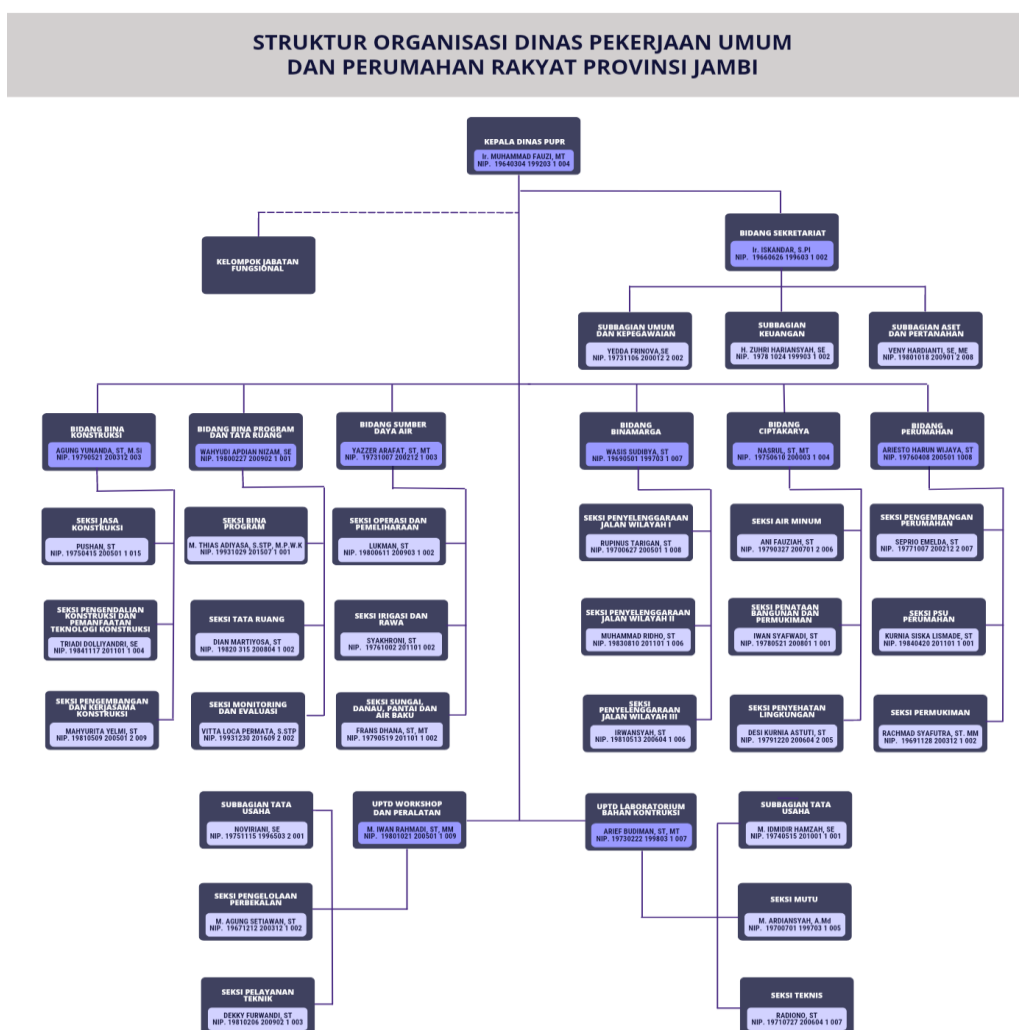
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi.
2. Mendorong Dinas PUPR Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas PUPR Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas PUPR Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Dinas PUPR Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Jambi

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 menggunakan struktur Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah terpenuhinya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur, dan yang kedua adalah sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan, dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya dibandingkan proses teknokratisnya.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas

dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu-isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu-isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan OPD, ada beberapa hal penting yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan seperti yang tertuang dalam program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kualitas pelayanan prasarana jalan Provinsi.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan.
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
4. Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung.
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
6. Pengembangan jasa konstruksi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi membuat beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan serta dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, seperti sebagai berikut:

1. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan permukiman tangguh bencana.
2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
3. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara.
4. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah

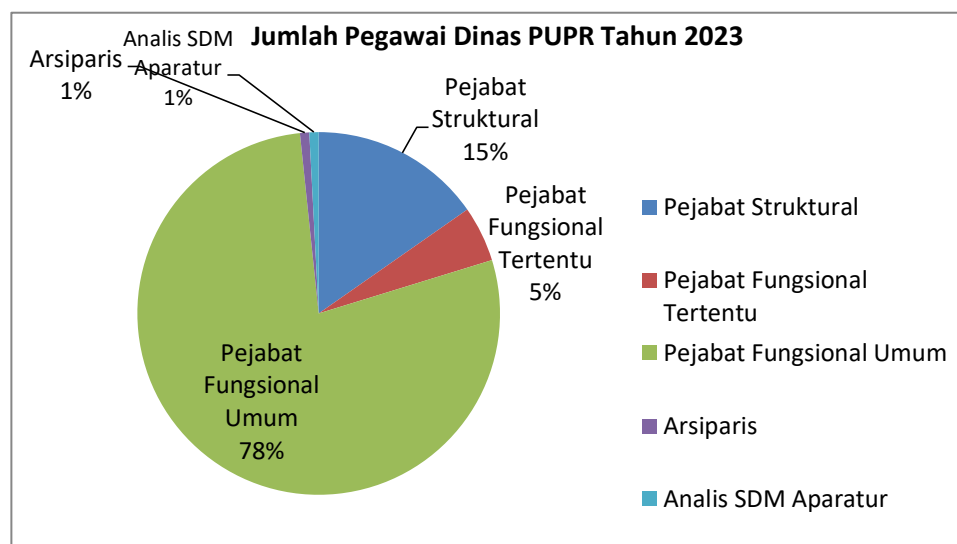
1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol, pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk Dinas PUPR Provinsi Jambi.

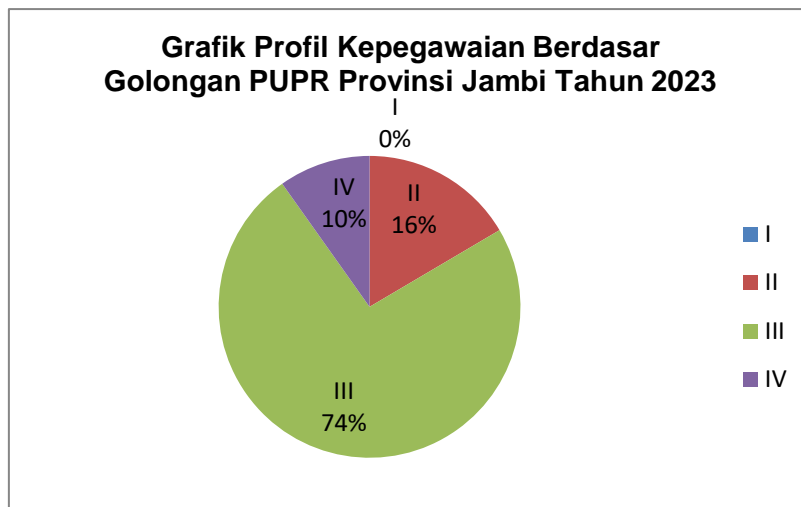
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2023 tercatat sebanyak **238 pegawai** yang terdiri **37 pejabat struktural**, **12 pejabat fungsional tertentu**, dan **189 pejabat fungsional umum**, **2 arsiparis** dan **2 analis SDM aparatur**

Profil Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2023 dapat dilihat pada diagram-diagram berikut ini:

Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023



Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023



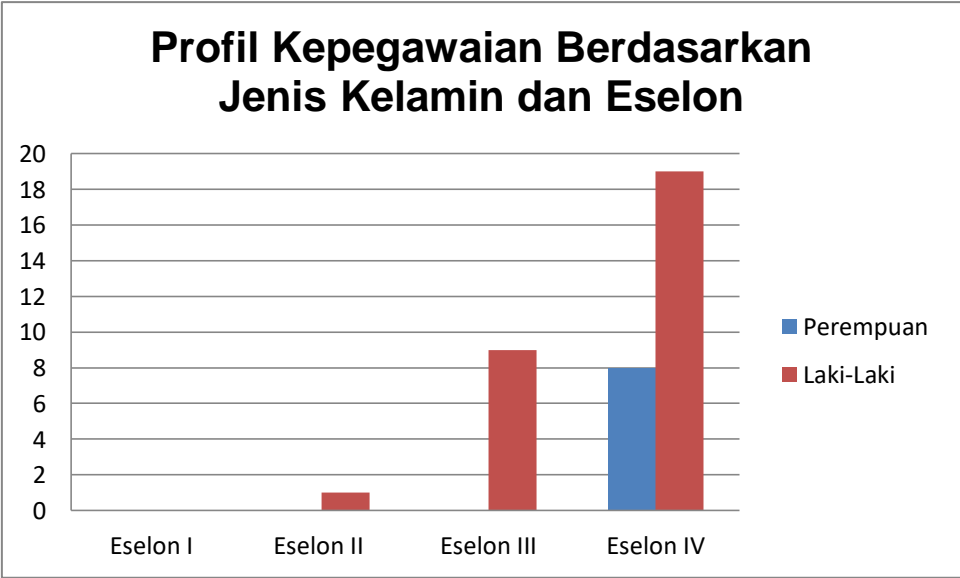
Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Golongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Golongan I : 0 Orang
- Golongan II : 40 Orang
- Golongan III : 175 Orang
- Golongan IV : 23 Orang

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas PUPR Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas PUPR Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

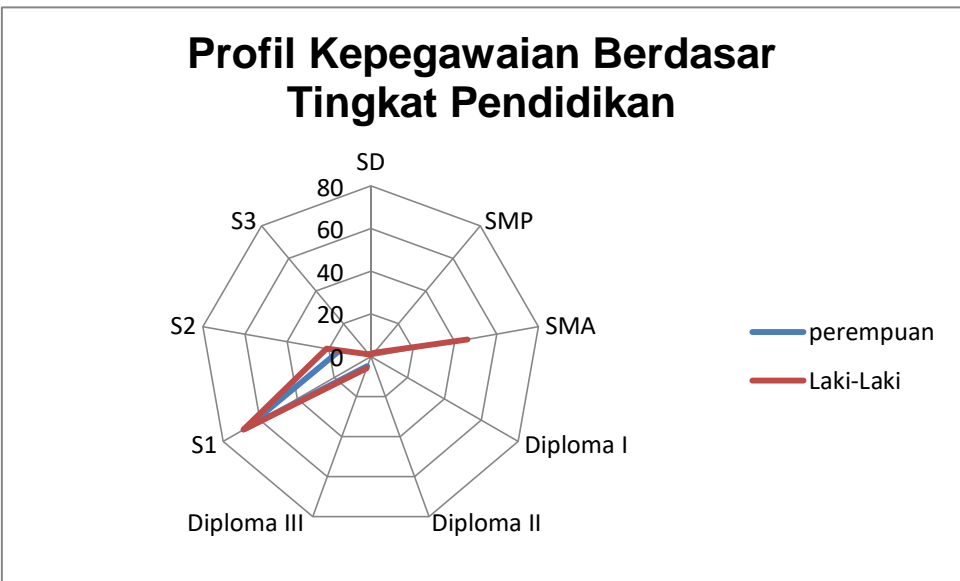
Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas PUPR Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas PUPR Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki dan pegawai perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang. Profil kepegawaian Dinas PUPR Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.5 Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR Provinsi Jambi



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas PUPR Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 dan Sarjana S2 dan untuk jabatan fungsional terdapat 12 orang yang ada di Dinas PUPR Provinsi Jambi.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi di Dinas PUPR Provinsi Jambi, meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas PUPR Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas PUPR Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi (Aset Tetap) Tahun 2023

No	Uraian	Banyak	Nilai/ Input (Rp)	(%)
1	Tanah	17	Rp 138,736,062,971.67	
2	Peralatan dan Mesin	5665	Rp 125,408,520,289.35	
3	Gedung dan Bangunan	113	Rp 260,860,493,731.93	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3270	Rp 7,552,994,663,920.73	
5	Aset Tetap Lainnya	694	Rp 209,727,977,625.31	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	Rp 79,540,299,777.90	
Jumlah s/d 31 Juni 2023		9760	Rp 8.367.268.018.316,89	

**Tabel 1.2
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi (Aset Lainnya) Tahun 2023**

No	Uraian	Banyak	Nilai/ Input (Rp)	(%)
1	Aset Lain-lain	1232	Rp 486,081,650,905.03	
2	Aset Tidak Berwujud	13	Rp 3,668,956,500.00	
3	Aset Rusak Berat	1221	Rp 15,610,336,630.72	
Jumlah s/d 31 Juni 2023		2466	Rp 505.360.944.035,75	

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu

dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi Jambi pada tahun 2023 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas PUPR Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 851,817,504,000 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 603,350,829,224 dan belanja langsung sebesar Rp. 248,466,674,776 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 603,350,829,224 yang didukung oleh 14 program dan 26 kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

➤ Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

➤ BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Provinsi Jambi, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

➤ **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

➤ **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

➤ **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

➤ **LAMPIRAN**

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Anggaran Tahun 2023
4. Instrumen Pendukung

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki tahun 2023, Dinas PUPR Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun kedepan. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan kegiatan di Dinas PUPR Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2022 Tanggal 28 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan *tema* “**Jambi Mantap**”. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2021-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2024.

Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan Langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Visi: “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan public yang prima	Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
					Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Kontribusi sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industri pengolahan	Kontribusi industry pengolahan terhadap PDRB
				Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2 eq)
			Tingkat kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka
				Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan
3.	Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya akses terhadap Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

Visi: "Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT"					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				pengembangan seni dan budaya	
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender

Sumber: RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas PUPR Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan Prasarana Jalan Provinsi.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

➤ Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas PUPR Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran antara lain :

1. Menyelenggarakan kualitas pelayanan prasarana jalan Provinsi.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan.
3. Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
4. Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6. Pengembangan Jasa Konstruksi

➤ **Sasaran Strategis**

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2022	Target tahunan				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	Persen	79,60%	83,23%	85,32%	87,83%	90,02%	90,02%
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	Persen	39,38%	49,61%	63,45%	75,48%	87,52%	87,52%
		Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	Persen	57,88%	86,01%	90,16%	94,90%	98,22%	98,22%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2022	Target tahunan				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	Penurunan Lingkungan Kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh	Ha	185 Ha	172 Ha	160 Ha	148 Ha	136 Ha	136 Ha
4	Meningkatnya penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi	%	-	25,00 %	37,50 %	37,50%	37,50%	37,50%
5	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan.	Persen	78,06%	79,08%	83,92%	85,00%	87,00%	90,00%
6	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.	Persen	40,00%	47,00%	54,00%	61,00%	68,00%	68,00%

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi Organisasi, adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan	1. Pemenuhan standar mutu jalan, kuantitas dan kualitas peralatan operasional, serta penanganan pembebasan lahan	1. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan Provinsi terutama akses menuju kawasan strategis provinsi
2.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air	1. Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi rawa, dan pengairan lainnya 2. Meningkatkan pengendalian terhadap daya rusak air

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
3	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Meningkatkan pemanfaatan sumber air baku	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan air baku
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak.	1. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman (TPA Regional, Pipa Sanitasi, dan Pengelolaan Limbah/IPAL)
		2. Identifikasi data base sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	2. Peningkatan ketersediaan akan kebutuhan lingkungan layak huni bagi masyarakat.
5	Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
6	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkatan kerja konstruksi	Meningkatkan mutu angkatan kerja konstruksi melalui pelatihan tersertifikasi profesi.
7	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Meningkatkan Jasa Pakai Alat Laboratorium	Peningkatan upgrade peralatan laboratorium
		2. Meningkatkan SDM berlisensi (bersertifikasi)	

Sumber : Renstra Dinas PUPR tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA, Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	83,23%
2	Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	49,61%
		Persentase Luas Baku daerah Irigasi yang terairi	86,01%
3	Penurunan Lingkungan Kumuh	Persentase Penurunan jumlah Kawasan permukiman kumuh	172 Ha
4	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi	25,00%
5	Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Universal Akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	79,08%

6	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten	47%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Predikat AKIP	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,6%

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2023

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 938,543,034,571,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 721,481,971,445,- dan Belanja Langsung Rp 217,061,063,126,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp 851,817,504,000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 603,350,829,224,- dan Belanja Langsung Rp 248,466,674,776,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 851,817,504,000- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 603,350,829,224- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 248,466,674,776,-

**Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2023**

No.	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 603,350,829,224.00	
2	Belanja Langsung	Rp 248,466,674,776.00	
Jumlah		Rp 851,817,504,000.00	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2023

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi**

No.	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Rp 434,160,073,389.00	63.12	Program Penyelenggaraan Jalan
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Rp 62,153,873,038.00	9.04	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Penurunan Lingkungan Kumuh	Rp 14,008,357,648.00	2.04	Program Kawasan Permukiman
4	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Rp 170,928,195,099.00	24.85	Program Penataan Bangunan Gedung
5	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses.	Rp 1,829,490,000.00	0.27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.	Rp 4,771,025,256.00	0.69	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Jumlah	Rp 687,851,014,430.00	100.00	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2023

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas PUPR Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :

1. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
3. *Realisasi Anggaran*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas PUPR Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas PUPR Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	83,23%	78,99%	94,91	
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	Persen	49,61%	49,04%	98,85	
		Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	Persen	86,01%	62,80%	73,01	
3	Penurunan lingkungan kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh.	Ha	172 Ha	0 Ha	0 Ha	
4	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi	Persen	25%	45,00%	100	
5	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	79,08%	79,19%	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio Tenaga Kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.	Persen	47%	47%	100	
7	Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Predikat AKIP		BB	BB	BB	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	91,6%	91,30%	99,67	

Sumber Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2023

Dinas PUPR Provinsi Jambi memiliki indikator sasaran kinerja yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis serta target kerja Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pada tahun 2023, indikator sasaran kerja telah memenuhi kriteria capaian indikator dengan klasifikasi tinggi sebesar 83,31%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2023, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas PUPR Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 83,31%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1 : Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap dengan indikator kinerjanya yakni persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Sasaran ini dicapai melalui program Penyelenggaraan Jalan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan.
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan.

- Pelebaran Jalan Menuju Standar.
- Rekonstruksi Jalan.
- Pemeliharaan Berkala Jalan.
- Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Pembangunan Jembatan.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan.
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan.

Tabel 3.2.1 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	83,23%	78,99%	94,91%

Capaian kinerja sasaran 1, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap dengan indikator kinerja persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap dengan realisasi sebesar 78,99% belum mencapai target pada Renstra yaitu sebesar 83,23% dengan persentase capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 94,91% hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 94,91% dengan kategori capaian ***Sangat Baik***.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

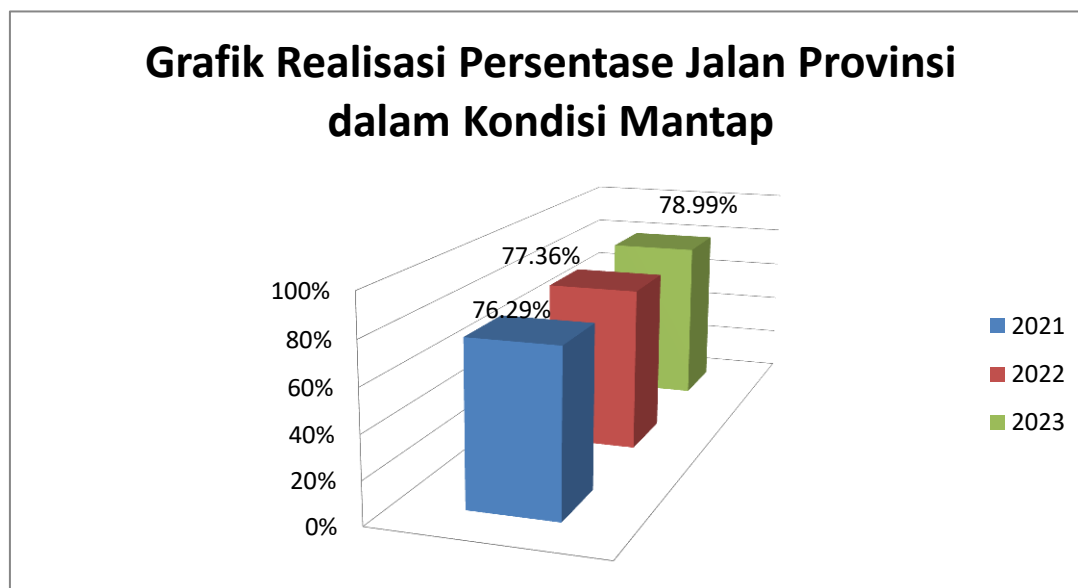
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap 3 tahun terakhir Tahun 2021- 2023

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	76,29%	77,36%	83,23%	78,99%	94,91%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 1,07% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 77,36% dari 76,29%, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 1,63% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 78,99% dari 77,36%.

Meningkatnya tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan jalan Provinsi dalam kondisi strategis, hal tersebut mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur di wilayah Provinsi Jambi, adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu :

1. Kemampuan Teknis
2. Pengawasan Yang Akuntabilisasi
3. Matangnya perencanaan



Gambar 3.1 Grafik Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap

Pencapaian Target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Terhadap Target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya		Kinerja Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir Tahun 2026
			RPJMD 2020	2021	2022	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	76,81%	76,29%	77,36%	83,23%	78,99%	94,91%	90,02%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 76,29% belum melewati target kondisi kinerja awal pada RPJMD tahun 2020 yaitu sebesar 76,81%, untuk realisasi tahun 2022 telah mencapai realisasi sebesar 77,36 % dan mengalami kenaikan sebesar 1,07% dari

realisasi tahun 2021. Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan realisasi dengan capaian realisasi kinerja sebesar 78,99%. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan realisasi setiap tahunnya dan telah melewati kondisi kinerja awal RPJMD tahun 2020.

Sasaran #2 : Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan indikator kinerjanya persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan dan persentase luas baku daerah irigasi yang terairi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa.
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa.

2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku.
- Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi.
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku.
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing.
- Normalisasi/ Restorasi Sungai.
- Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya.
- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai.
- Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi.

Capaian kinerja sasaran 2, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum, dalam uraian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 2 (dua) ini telah memberikan capaian yang cukup signifikan, hal tersebut mengalami peningkatan pada indikator pertama dan penurunan pada indikator kedua dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4 Capaian Realisasi Kinerja Pada Sasaran Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Berfungsinya Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	49,61%	49,04%	98,85%
		Persentase Luas Baku Daerah Irigasi yang terairi	86,01%	62,80%	73,01%

Capaian kinerja sasaran 2, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan dua indikator kinerja yaitu yang pertama, persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan dengan realisasi sebesar 49,04% belum mencapai target pada Renstra yaitu sebesar 49,61% dengan persentase capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 98,85% hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga tidak seluruh paket pekerjaan dapat dilaksanakan. Indikator kinerja pertama pada sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 98,85% dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

Indikator kinerja kedua yaitu persentase luas baku daerah memiliki realisasi sebesar 62,80% belum mencapai target pada Renstra yaitu sebesar 86,01% dengan persentase capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 73,01% hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, banyaknya jaringan irigasi yang rusak sehingga membutuhkan rehabilitasi dan untuk melakukan perbaikan tidak memiliki alokasi anggaran yang cukup. Indikator kinerja kedua pada sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 73,01% dengan kategori capaian **Sedang**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

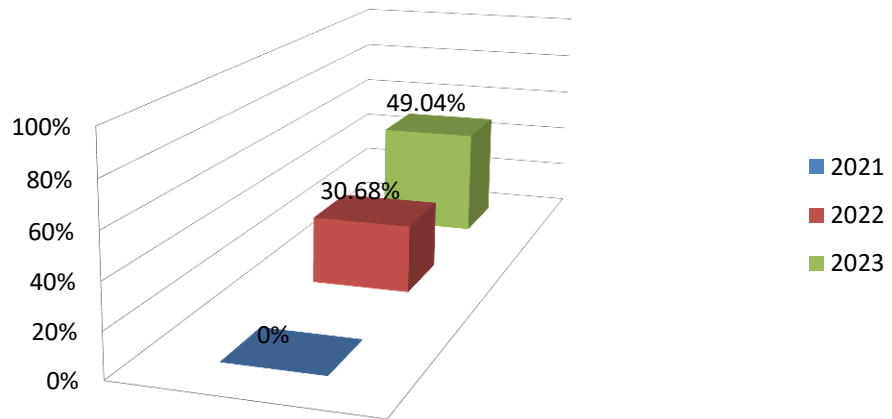
Tabel 3.2.5. Capaian kinerja pada sasaran Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 3 tahun terakhir Tahun 2021- 2023

No.	Indikator	Capaian		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Tercapainya Kualitas Pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan.	0%	30,68%	49,61%	49,04%	98,85%
2	Persentase Luas Baku daerah Irigasi yang terairi	0%	79,65%	86,01%	62,80%	73,01%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 untuk indikator yang pertama yaitu persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan sebesar mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 18,36% dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 30,68% menjadi 49,04%.

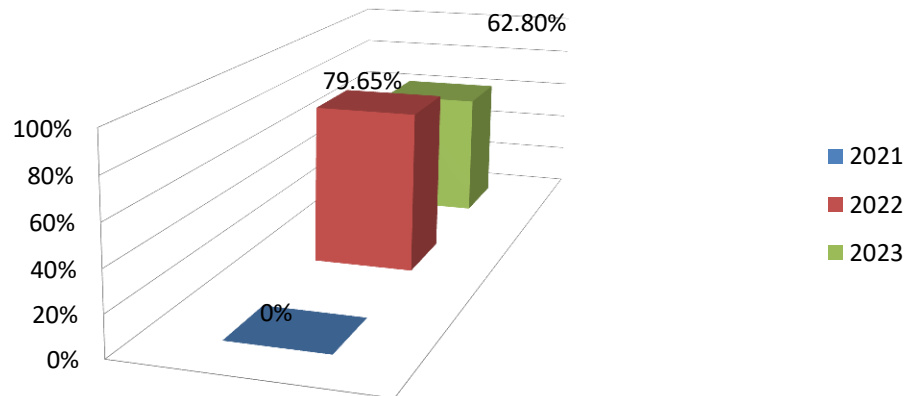
Indikator kinerja yang kedua yaitu persentase luas baku daerah irigasi yang terairi memiliki capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 79,65% dan mengalami penurunan realisasi sebesar 16,85% pada tahun 2022 menjadi 62,80%, adapun persentase capaian kinerja sasaran kedua pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Realisasi Persentase Tercapainya Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu Pada Tahun Berkenaan



Gambar 3.2 Grafik Realisasi Persentase Tercapainya Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu Pada Tahun Berkenaan
Pencapaian Target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Grafik Realisasi Persentase Luas Baku daerah Irigasi yang Terairi



Gambar 3.3 Grafik Realisasi Persentase Luas Baku daerah Irigasi yang Terairi

Pencapaian Target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.2.6 Capaian Kinerja pada Sasaran Berfungsinya Jaringan Irigasi. Rawa. dan Jaringan Pengairan Lainnya Terhadap Target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya		Kinerja Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir Tahun 2026
			RPJMD 2020	2021	2022	Target	Realisasi		
1	Befungsinya Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Tercapainya Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu pada Tahun Berkenaan	76,90%	-	30,68%	49,61%	49,04%	98,85%	87,52%
2		Persentase Luas Baku daerah Irigasi yang Terairi	76,90%	-	79,65%	86,01%	62,80%	73,01%	98,22%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2022 untuk indikator kinerja persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan telah mencapai realisasi sebesar 30,68% dan realisasi pada tahun 2023 sebesar 49,04%. Capaian belum melampaui kondisi kinerja awal RPJMD tahun 2020 yaitu sebesar 79,60%

Indikator kinerja kedua yaitu persentase luas baku daerah irigasi yang terairi pada tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 79,65% dan mencapai realisasi sebesar 62,80% pada tahun 2023. Berdasarkan capaian pada tabel tersebut untuk realisasi pada tahun 2022 telah melewati kondisi kinerja awal RPJMD tahun 2020 sebesar 76,90% dan capaian pada tahun 2023 sebesar 62,80% belum melampaui kondisi kinerja awal RPJMD pada tahun 2020.

Sasaran #3 : : Penurunan Lingkungan Kumuh dengan indikator persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh. Sasaran ini dicapai melalui program kawasan permukiman yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
Sub kegiatannya sebagai berikut;
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
2. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
Sub kegiatannya sebagai berikut;
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman.
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

Tabel 3.2.7 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Penurunan Lingkungan Kumuh Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Penurunan Lingkungan Kumuh	Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	172 Ha	0 Ha	0 %

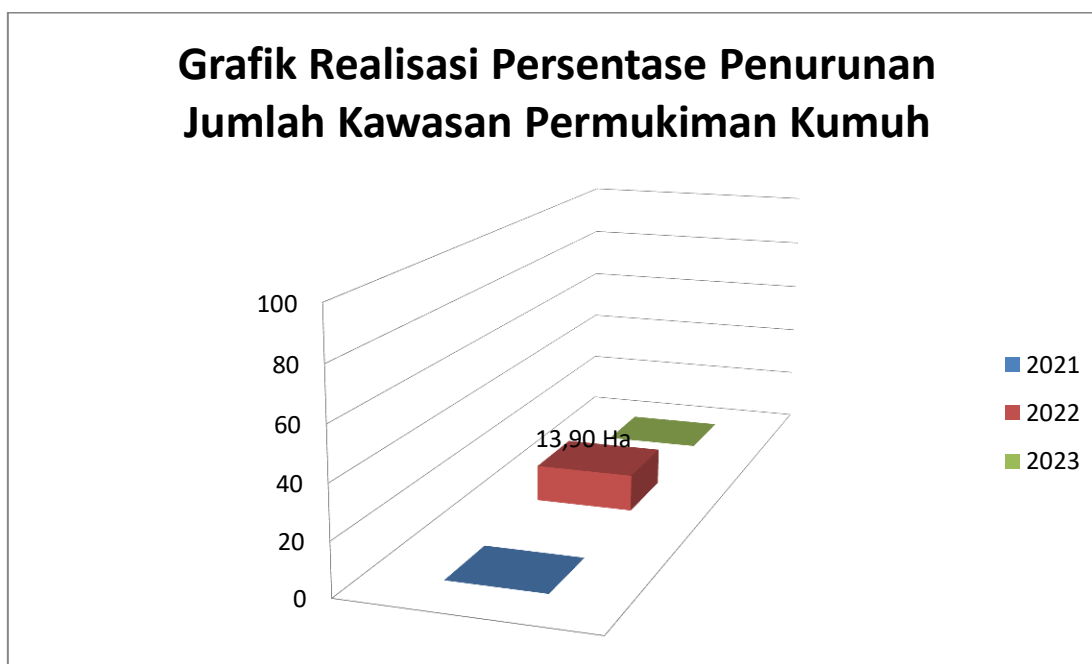
Capaian kinerja sasaran 3 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis Penurunan Lingkungan Kumuh dengan satu indikator kinerja yaitu persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh dengan realisasi sebesar 0 Ha belum mencapai target pada Renstra yaitu sebesar 0 Ha dengan persentase capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 0% hal ini dikarenakan seluruh Kabupaten/Kota belum memiliki SK penetapan kawasan kumuh sehingga Provinsi tidak dapat melaksanakan kegiatan penanganan penurunan lingkungan kumuh. Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 0% dengan kategori capaian **Sangat Rendah**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.8 Capaian Kinerja pada Sasaran Penurunan Lingkungan Kumuh 3 tahun terakhir Tahun 2021-2023

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	0 Ha	13,90 Ha	172 Ha	0 Ha	0 %

tabel di atas terlihat bahwa, capaian kinerja pada tahun 2021 untuk sasaran yang ketiga yaitu persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh yaitu sebesar 0 Ha, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 13,90 Ha. Untuk tahun 2023, sasaran ketiga mengalami penurunan capaian menjadi 0 Ha, adapun persentase capaian kinerja sasaran ketiga pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.4 Grafik Realisasi Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh
Pencapaian Target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Sasaran #4 : Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi. Sasaran ini dicapai melalui program penataan bangunan gedung yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Capaian kinerja sasaran 4, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 4 (empat) ini meningkat dalam 3 tahun terakhir. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.9 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi	25%	45%	100%

Capaian kinerja sasaran 4, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan satu indikator kinerja yaitu persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi dengan realisasi sebesar 45 % sudah mencapai target pada Renstra yaitu sebesar 25% dengan persentase capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan karena pada tahun 2023 telah diselesaikannya pembangunan bangunan Gedung Islamic Center Jambi, dan pembangunan bangunan gedung Stadion. Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase

capaian sebesar 100% dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.10 Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 3 tahun terakhir Tahun 2021-2023

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi	0	100%	25%	45%	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 untuk indikator persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi cukup signifikan pada tahun berkenaan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 55% dari realisasi sebesar 100% pada tahun 2022 menjadi 45%, adapun persentase capaian kinerja sasaran ketiga pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut



Gambar 3.5 Grafik Pencapaian Target Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi
Pencapaian Target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Sasaran #5 : Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Masyarakat Untuk mendukung Universal Akses dengan indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan. Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

Sub kegiatannya sebagai berikut;

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.

Capaian kinerja sasaran 5, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 5 (lima) ini meningkat dalam 3 tahun terakhir. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.11 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Masyarakat untuk mendukung Universal Akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	79,08%	79,19%	100%

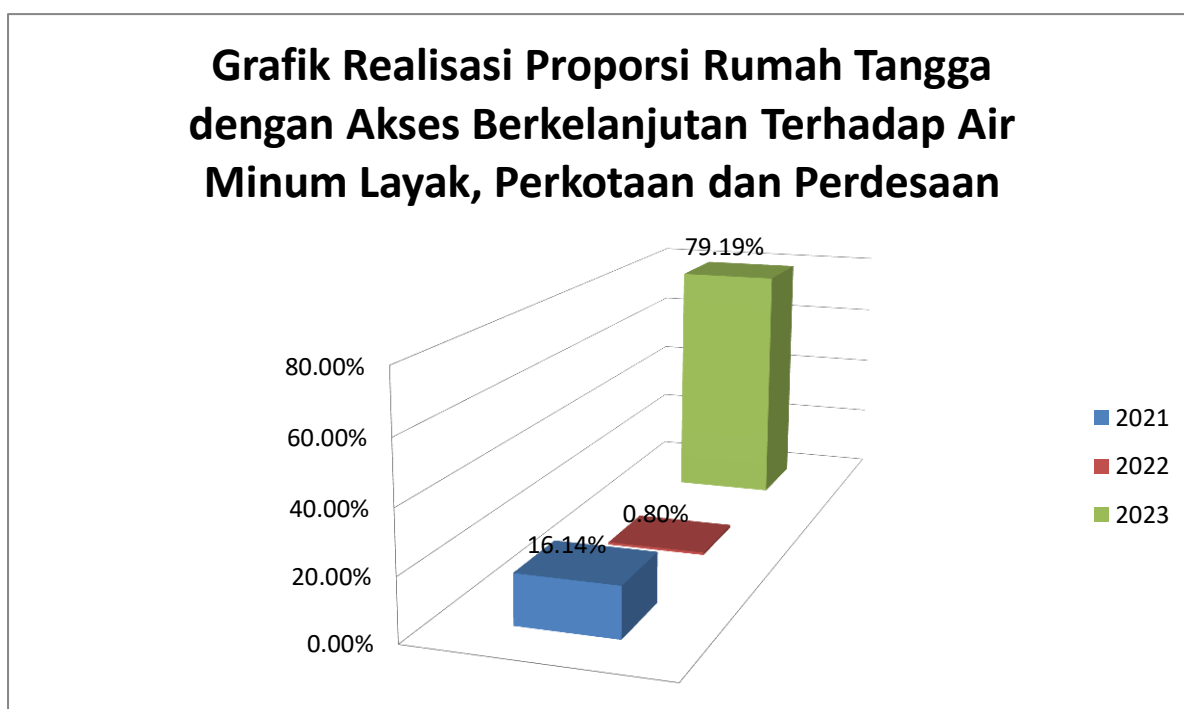
Capaian kinerja sasaran 5, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung Universal Akses dengan indikator kinerja, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dengan realisasi sebesar 79,19% telah mencapai target pada Renstra yaitu sebesar 79,08% dengan persentase capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 100% dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2.12 Capaian Kinerja pada Sasaran Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses 3 tahun terakhir tahun 2021-2023

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	16,14%	0,80%	79,08%	79,19%	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, capaian kinerja pada tahun 2021 untuk indikator persentase proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan memiliki realisasi sebesar 16,14% dan mengalami penurunan realisasi cukup signifikan sebesar 15,34% pada tahun 2022 menjadi 0,80%. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 78,39% menjadi 79,19%, adapun faktor keberhasilan dari sasaran strategis ini yaitu peran serta semua stakeholder dalam mendukung pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Jambi.



Gambar 3.6 Grafik Realisasi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan
Pencapaian Target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.2.13 Capaian Kinerja pada Sasaran Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat Untuk Mendukung Universal Akses Terhadap Target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya		Kinerja Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir Tahun 2026
			RPJMD 2020	2021	2022	Target	Realisasi		
1	Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat Untuk Mendukung Universal Akses	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	78,06%	16,14%	78,86%	79,08%	79,19%	100%	90,00%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2021 untuk indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak telah mencapai realisasi sebesar 16,14%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi cukup signifikan mencapai 78,86%, dan kembali mengalami kenaikan realisasi pada tahun 2023 mencapai 79,19%. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja untuk indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan mengalami kenaikan pada tahun 2021, 2022 dan 2023, dan melebihi kondisi kinerja awal RPJMD tahun 2020 pada tahun 2022 dan 2023.

Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan target nasional sebagai berikut:

Tabel 3.2.14 Capaian Kinerja pada Sasaran Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat Terhadap Capaian Nasional

No.	Indikator	Capaian Nasional 2022	Capaian 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	91,05%	79,08%	79,19%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak untuk tahun 2023 belum melampaui target nasional yaitu sebesar 79,19% dari 91,05%.

Sasaran #6: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan indikator Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli. Sasaran ini dicapai melalui program pengembangan jasa konstruksi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Penyiapan Instruktur/ Asesor/ Penyelenggaraan Pelatihan.
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.
- Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi.
- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi.

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi.
- Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi.
- Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI.
- Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU.
- Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi.

3. Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sub kegiatannya sebagai berikut:

- Penyiapan/ Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi.

Capaian kinerja sasaran 6, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 6 (enam) ini meningkat dalam 3 tahun terakhir. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 6 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.15 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	47,00%	47,00%	100%

Capaian kinerja sasaran 6, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dengan indikator kinerja, rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli dengan realisasi sebesar 47,00% telah mencapai target pada Renstra yaitu sebesar 47,00% dengan persentase capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 100% dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

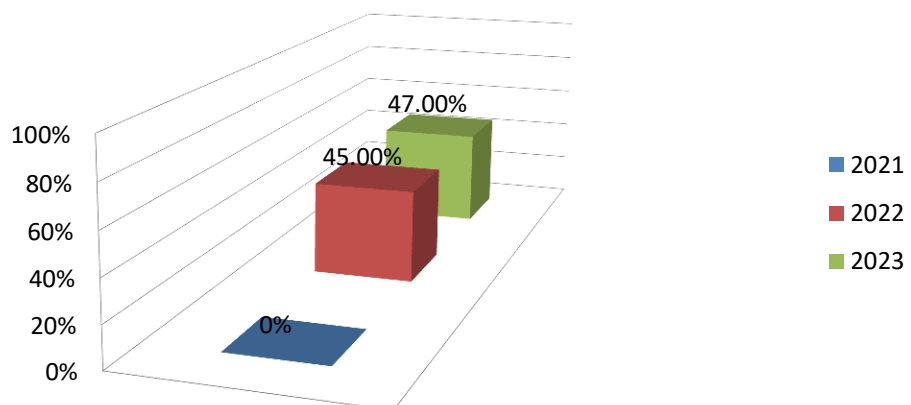
Tabel 3.2.16 Capaian Kinerja pada Sasaran Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 3 tahun terakhir tahun 2021-2023

No.	Indikator	Capaian		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	0%	45,00%	47,00%	47,00%	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 untuk indikator rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 45% mengalami kenaikan pada

tahun 2023 sebesar 2% dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 menjadi 47% adapun faktor keberhasilan dari sasaran strategis ini yaitu karena tingginya kebutuhan tenaga kerja konstruksi (TKK) di lingkungan kerja sehingga meningkatkan jumlah peserta Tenaga Kerja Konstruksi yang ingin mengikuti pelatihan ahli.

Grafik Realisasi Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli



Gambar 3.7 Grafik Realisasi Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli
Pencapaian Target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Sasaran #7: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dengan indikator predikat peringkat AKIP Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Sasaran ini dicapai melalui program penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatannya sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Capaian kinerja sasaran 7 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 7 (tujuh) ini meningkat dalam 3 tahun terakhir. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 7 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.17 Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Predikat AKIP	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,6%	91,30%	99,67%

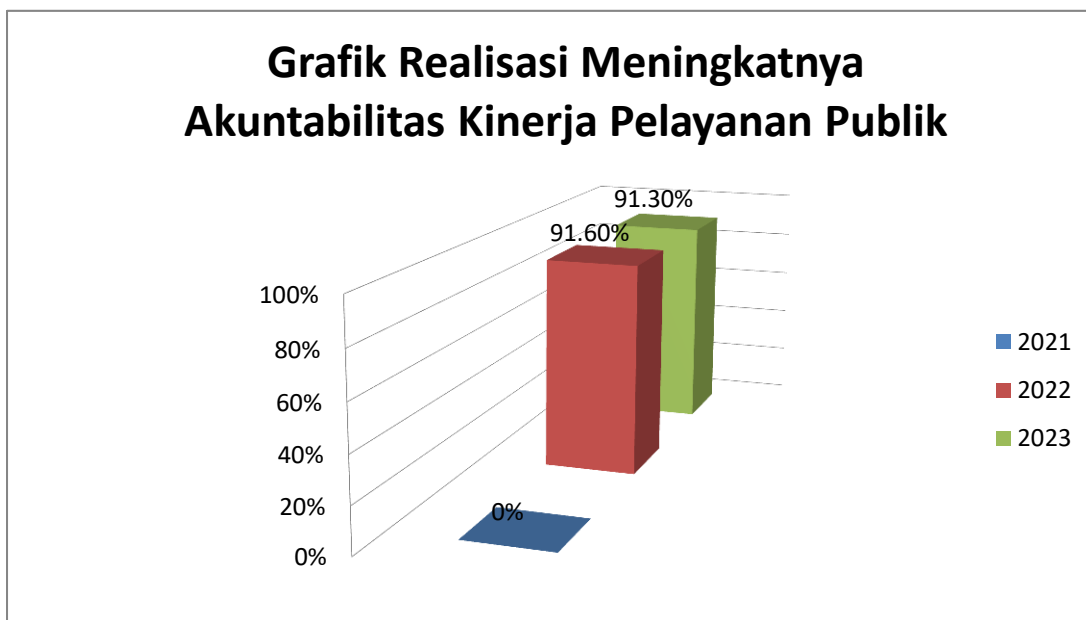
Capaian kinerja sasaran 7, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik dengan indikator kinerja predikat AKIP dengan kategori capaian BB, adapun untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat memperoleh realisasi sebesar 91,30% belum memenuhi target yaitu sebesar 91,6%. Sasaran ini telah memberikan rata – rata persentase capaian sebesar 99,67% dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

Tabel 3.2.18 Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 3 tahun terakhir tahun 2021-2023

No.	Indikator	Capaian		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Predikat AKIP	-	BB	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	0%	91,60%	91,60%	91,30%	99,67%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 untuk indikator Predikat AKIP perangkat daerah dengan predikat BB dan untuk tahun 2023 kembali meraih peringkat BB, adapun untuk indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2022 meraih capaian sebesar 91,60%,

dan untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,30% dengan capaian sebesar 91,30% dari 91,60%. Persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2023 sebesar 99,67%.



Gambar 3.8 Grafik Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
Pencapaian Target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2023 sebesar Rp 829, 785, 228,304.65.- (97,74%) dari total anggaran yang dialokasikan.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,23%	78,99 %	94,90 %	Rp 434,160,073,389.00	Rp 428,973,705,700.00	98,81
2	Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	49,61%	49,04 %	98,89 %	Rp 26,365,369,420.00	Rp 25,974,331,191.00	98,52
		Persentase Luas Baku daerah irigasi yang terairi	86,01%	62,80 %	73,01 %	Rp 35,788,503,618.00	Rp 34,137,651,842.00	95,39
3	Penurunan Lingkungan kumuh	Persentase Penurunan Jumlah kawasan permukiman kumuh.	172 Ha	-	-	Rp 14,008,357,648.00	Rp 13,987,340,745.00	99,85
4	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi	25,00%	45,00 %	100%	Rp 170,928,195,099.00	Rp 170,250,825,057.00	99,60
5	Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	79,08%	79,19 %	100%	Rp 1,829,490,000.00	Rp 1,698,790,805.00	92,86
6	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	47,00%	100%	100%	Rp 4,771,025,255.00	Rp 4,624,464,965.00	96,93

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2023

Tabel 3.4 Daftar Paket Pekerjaan Tidak Terealisasi dan Tunda Bayar T.A 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

No	Sasaran Strategis	Paket Pekerjaan	Target (%)	Realisasi (%)	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Berfungsinya Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Normalisasi Danau Desa Keminging Luar Taman Rajo Muaro Jambi	-	-	-	-	Rp 200,000,000.00	-	Batal Dikarenakan Kondisi Banjir
		Normalisasi Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi	-	-	-	-	Rp 150,000,000.00	-	Batal Dikarenakan Kondisi Banjir
		Normalisasi Sungai di Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari	100%	44,59 %	01 Desember 2023	27 Desember 2023	Rp 150,000,000.00	Rp 66,678,757.00	Pekerjaan dihentikan karena keadaan kahar (banjir)
		Pembangunan Perkuatan Tebing di Desa Moenti Kec. Limun Kab. Sarolangun	-	-	-	-	Rp 180,000,000.00	-	Batal Dikarenakan Kondisi Banjir
		Pembangunan Sumur Air Dalam di Sepintun Kab. Sarolangun	-	-	-	-	Rp 500,000,000.00	-	Tidak dikerjakan karena waktu pelaksanaan tidak cukup
		Pengawasan Air Baku Kab. Muaro Jambi	-	-	-	-	Rp 50,000,000.00	-	Tidak dikerjakan karena tidak ada kegiatan di kabupaten

No	Sasaran Strategis	Paket Pekerjaan	Target (%)	Realisasi (%)	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
									tersebut
2	Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Lanjutan Pembangunan Jembatan Kelok Sago	100%	48,68 %	21/02/2023	18/10/2023 Addendum 27/12/2023	Rp 24,724,926,000.00	Rp 13,337,614,082.00	Terdapat perubahan metode dalam pelaksanaan erection rangka baja yang memakan waktu pembangunan jembatan kelok sago yang menjadi faktor penghambat penyelesaian pekerjaan
3	Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses	Penyusunan Capaian SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum	0%	0%			Rp 100,000,000	0	Penyusunan Capaian SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak cukup untuk dilaksanakan
		Penyusunan Capaian SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah	0%	0%			Rp 100,000,000	0	Penyusunan Capaian SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak cukup untuk dilaksanakan
		Update Fasilitas HDNo	0%	0%			Rp 50,000,000	0	tidak dilaksanakan, belum ada permintaan dari kementerian K/L/P/D

No	Sasaran Strategis	Paket Pekerjaan	Target (%)	Realisasi (%)	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
		Pengawasan Teknis Belanja Hibah di Kab. Muaro Jambi	0%	0%			Rp 90,000,000	0	tidak dilaksanakan, diakibatkan lelang yang terlambat sehingga waktu untuk pelaksanaan tidak cukup.
		Perencanaan Teknis Pembangunan Sumur Bor Desa Arang-Arang, Desa Muhajirin dan Ponpes Al Anwar Kab. Muara Jambi	0%	0%			Rp 70,000,000	0	tidak dilaksanakan, diakibatkan lelang yang terlambat sehingga waktu untuk pelaksanaan tidak cukup.
4	Penurunan Lingkungan kumuh	Pengawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan PSU Desa Rambutan Masam	100%	100%	28 November 2023	27 Desember 2023	Rp 100,000,000	0	keterlambatan pencairan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada sasaran berfungsinya jaringan irigasi rawa terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak terealisasi atau dibatalkan dikarenakan lokasi pekerjaan sedang dalam kondisi banjir. Paket pekerjaan pembangunan sumur air dalam di Sepintun Kab. Sarolangun dibatalkan karena waktu pelaksanaan tidak cukup, dan juga untuk paket pekerjaan pengawasan air baku Kab. Muaro Jambi dikarenakan tidak ada kegiatan di kabupaten tersebut.

Sasaran meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap terdapat paket pekerjaan yang tidak terealisasi yaitu paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Kelok Sago dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 48,68% dengan target waktu akhir pekerjaan yaitu 18 Oktober 2023 karena terdapat perubahan metode pekerjaan sehingga terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk itu dilakukan addendum atau perpanjangan waktu hingga 27 Desember 2023 akan tetapi pembangunan Kelok Sago masih belum dapat terealisasi sesuai target dikarenakan faktor cuaca yang kurang mendukung dan beberapa peralatan yang mengalami kerusakan untuk itu berdasarkan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran pada Pasal 5 Ayat 1 pekerjaan dapat diperpanjang 50 Hari Kalender setelah akhir tahun anggaran berakhir dan untuk saat ini pelaksanaan pembangunan Kelok Sago masih terus diupayakan dengan beberapa kendala yang terjadi saat ini seperti banjir dan longsor sehingga membuat progress pembangunan dari penambahan waktu tersebut untuk sementara belum dapat dilanjutkan sampai bencana banjir dan longsor ditangani.

Sasaran tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses terdiri dari beberapa paket pekerjaan yang belum terealisasi yaitu penyusunan capaian SPM pekerjaan umum sub bidang air minum dan air limbah tidak terealisasi akibat waktu pelaksanaan tidak cukup untuk dilaksanakan, untuk paket Pengawasan Teknis Belanja Hibah di Kab. Muaro Jambi dan Perencanaan Teknis Pembangunan Sumur Bor Desa Arang-Arang, Desa Muhajirin dan Ponpes Al Anwar Kab. Muara Jambi tidak terealisasi karena lelang yang terlambat sehingga waktu untuk pelaksanaan tidak memadai.

Sasaran penurunan lingkungan kumuh, paket pekerjaan yang tidak terealisasi yaitu pengawasan peningkatan kualitas lingkungan PSU Desa Rambutan Masam diakibatkan keterlambatan pencairan.

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis efisiensi Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	94,91	98,81	96,06
2	Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	98,85	98,52	100,33
		Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	73,01	95,39	76,54
3	Penurunan Lingkungan Kumuh	Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	0	99,85	0,00

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi	100	99,60	100,40
5	Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat untuk mendukung Universal Akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100	92,86	107,69
6	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100	96,93	103,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2023

➤ Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas PUPR Provinsi Jambi rata-rata telah melebihi target dengan tingkat efisiensi yang sama dengan target Renstra untuk tahun 2023.

BAB 4

Penutup

Bab 4 berisi :

*Kesimpulan
Rencana Tindak
Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas PUPR Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas PUPR tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap”, dengan indikator Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap, realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2023 adalah sebesar 78,99 %. Realisasi kinerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 83,23%, dengan efisiensi anggaran sebesar 96,06%.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah “Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya”, dengan indikator Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan dengan realisasi kinerja Dinas PUPR Tahun 2023 adalah sebesar 49,04% masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 49,61% dengan efisiensi anggaran sebesar 100,33% dan Persentase Luas Baku Daerah Irigasi yang Terairi realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2023 adalah sebesar 62,80%. Realisasi kinerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 86,01%, dengan efisiensi anggaran sebesar 76,54%.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah “Penurunan Lingkungan Kumuh”, dengan indikator Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan

realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2023 adalah 0 Ha, Realisasi kerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 172 Ha, dengan efisiensi anggaran sebesar 0 %.

- Dari analisis sasaran perangkat daerah “ Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi”, dengan indikator penurunan luas kawasan permukiman kumuh dengan realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2023 adalah sebesar 45%. Realisasi kerja Dinas PUPR sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 25 %, dengan efisiensi anggaran sebesar 100,40%.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah “Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses”, dengan indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan. Realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2023 adalah sebesar 79,19%. Realisasi kinerja Dinas PUPR sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 79,08%, dengan efisiensi anggaran sebesar 107,69%.
- Dari analisis sasaran perangkat daerah “ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi”, dengan indikator “ Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli”, realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2023 adalah sebesar 47%. Realisasi kerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 47%, dengan efisiensi anggaran sebesar 103,17%.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Diperlukan sistem perencanaan yang lebih akurat sesuai dengan tingkat kebutuhan, serta mengantisipasi kebutuhan material jika terjadi kelangkaan dan permasalahan dalam pendistribusian material tertentu. Dengan demikian pengawasan bersifat teknis yang mengacu pada pengendalian mutu dan kualitas.
2. Perencanaan Program mengacu pada skala prioritas dan mengoptimalkan dana yang ada pada kegiatan yang sangat membutuhkan penanganan segera.

3. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan serta mengupayakan pendanaan semaksimal mungkin yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau lembaga terkait,
5. Melakukan pembenahan dan penataan ulang terkait aset data fisik maupun non fisik di bidang infrastruktur operasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Renstra 2021-2026 (Tujuan/Sasaran)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Sat	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Menyelenggarakan Kualitas Pelayanan Prasarana Jalan Provinsi	Meningkatnya Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	%	79,60	83,23	85,32	87,83	90,02	90,02
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Air yang fungsional dan berkelanjutan	Berfungsinya Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	%	39,38	49,61	63,45	75,48	87,52	87,52
	Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	Persentase Luas Baku daerah irigasi yang terairi		81,04	86,01	90,16	94,9	98,22	98,22

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Penurunan Lingkungan Kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan bangunan dan gedung strategis Provinsi	Ha	185 Ha	172 Ha	160 Ha	148 Ha	136 Ha	136 Ha
Terselenggaranya Penataan bangunan gedung	Meningkatnya penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi	%	-	25%	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	78,06	79,08	83,92	85,00	87,00	9,00

Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	40,00	47,00	54,00	61,00	68,00	68,00
------------------------------	--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT**
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**
Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2023

Pihak Kedua,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Pihak Pertama,



Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	83,23%
2.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	49,61%
		Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	86,01%
3.	Penurunan lingkungan kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh	172 Ha
4.	Meningkatnya penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi	25,00%
5.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan tahapan air minum layak, perkotaan dan perdesaan	79,08
6.	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	47,00%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Predikat AKIP	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,6%

NO	Program	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	54,929,955,439	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAHAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	68,283,768,831	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	2,900,000,000	APBD
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp	4,549,999,970	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	2,244,859,920	APBD
6.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE	Rp	5,587,942,250	APBD
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp	24,299,199,150	APBD
9.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	206,340,000,100	APBD
10.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Rp	25,150,000,000	APBD
11.	PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN	Rp	520,850,357,583	APBD
12.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	3,999,997,701	APBD
13.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	3,041,454,000	APBD
14.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	14,395,357,648	APBD
15.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	47,667,839,377	APBD

Gubernur Jambi,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Jambi,


Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1 004

Lampiran 3.
Matriks Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	83,23%	78,99%	94,91
2	Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	49,61%	49,04%	98,85
		Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	86,01%	62,80%	73,01
3	Penurunan Lingkungan Kumuh	Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	172 Ha	0 Ha	0 Ha
4	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi	25%	45%	100
5	Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat untuk Mendukung Universal Akses	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	79,08%	79,19%	100

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
6	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	47%	100%	100

Lampiran 4. Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Lajen M.T. Haryono No. 2, Telanagapura, Jambi
Telp. (0741) 81600 - Fax. (0741) 82317 Website: www.sipat2008@setda.go.id

Jambi, 16 Juni 2023
Ditandatangani 1444 11

Nomor : LAP-700/245/ITPROV-2/M/2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal :
Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi
di:
Jambi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun 2022, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- 6) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118/KEP.GUB/ITPROV-4/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
- 7) Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 090/161/SPT/ITPROV-1.1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan Nomor 090/77/SPT/ITPROV-1.1/IV/2023 tanggal 10 April 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkategorian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

WPJ	PT	KT
✓	✓	✓

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem manajemen yang menerapkan siklus *Planning, Do, Check* dan *Act* dimana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperhatikan kinerjanya dalam bentuk umpan balik yang dilaksanakan secara terus menerus.

Evaluasi bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam rangka mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Rencana Strategi (RENSTRA) masing-masing Perangkat Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun 2021 memperoleh Kategori "B" yang diinterpretasikan sebagai Perangkat Daerah yang dalam sistem yang dapat sehingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian perencanaan kinerja atas ketersediaan dokumen, dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan berdampak dalam peningkatan implementasi SAKIP secara efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (manfaat) serta kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, yaitu:

WPJ	PT	KT
✓	✓	✓

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
Teknis Pengumpulan Data dan Informasi berupa menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Teknis Tanya Jawab Sederhana merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan dengan wawancara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon dan chat.
3. Observasi
Teknis observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Uraian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Dinas PUPR Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsinya, yaitu : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan fungsinya :

- 1) Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Jambi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris
3. Bidang Bina Program dan Tata Ruang
4. Bidang Sumber Daya air (SDA)
5. Bidang Bina Marga
6. Bidang Cipta Karya
7. Bidang Perumahan
8. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
9. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
10. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

Penetapan kinerja utama Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis 2021-2026 yang sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut:

WPJ	PT	KT
✓	✓	✓

3

Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR
Provinsi Jambi Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
					8
Menyempurnakan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi		Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	79,60
Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan		Berfungsinya jaringan irigasi rawa, jaringan pengendalian banjir	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	%	39,38
			Persentase luas buku daerah pengisian lerai	%	87,04
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh		Penurunan lingkungan kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh	Ha	185
Terseleksi dan penataan bangunan gedung		Meningkatnya penataan bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pembangunan dan gedung strategis provinsi	%	-
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal aset	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	%	78,06
Pengembangan jasa konstruksi		Peningkatan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	40,00

Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	79,60 %
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengendalian banjir	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	39,38 %
3	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh	185 Ha
4	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal aset	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	78,06 %
5	Penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pembangunan dan gedung strategis provinsi	-
6	Peningkatan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	40,00 %
7	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,4 %

WPJ	PT	KT
✓	✓	✓

4

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2022 tersebut, Dinas PUPR Provinsi Jambi mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp826.414.533.884,00 yang digunakan untuk melaksanakan 16 program dengan 27 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.108.162.000,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	97.336.914.000,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.750.000.000,00
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.850.000.000,00
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum Umbah	1.250.000.000,00
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	16.500.000.000,00
7	Program Pengembangan Pemukiman	18.400.000.000,00
8	Program Perataan Bangunan Gedung	101.360.000.000,00
9	Program Perataan Bangunan dan Lingkungannya	32.000.000.000,00
10	Program Penyelenggaraan Jalan	667.660.000.000,00
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	9.600.000.000,00
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	255.050.000.000,00
13	Program Pengembangan Perumahan	1.490.000.000,00
14	Program Kawasan Pemukiman	28.550.000.000,00
15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.346.308.000,00
16	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	200.000.000,00
JUMLAH		826.414.533.884,00

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Penilaian Implementasi SAKIP Unit Kerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, saat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar

WPJ	PT	KT
4	2	3

5

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 memperoleh nilai **71,70** kategori **'BB'** dengan interpretasi **'Sangat Baik'** dengan catatan. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub-komponen			Total Nilai
			Kebijakan (25%)	Kualitas (10%)	Pemantauan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30%	5,4	7,3	12	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	5,4	5,4	10,5	21,30
3	Pelaporan Kinerja	15%	2,7	1,35	4,5	8,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	4,5	5,25	7,5	17,25
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100	18	19,2	34,5	71,70

H. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2021, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Direkomendasikan kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti: a. Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari selingkat eselon IV keatas dikaitkan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment; b. Melakukan Reriv terhadap IKU secara berkala; c. Laporan Kinerja menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan penjelasan pencapaian target kinerja; d. Memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan; e. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja tujuan yang relevan serta target-target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut. f. Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala dan mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait agar rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata.	Selesai ditindaklanjuti

2. Gambaran Hasil Evaluasi

I. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

- Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/Kep.Gub/Seida.Org-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 16 Agustus 2022;
- Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;

WPJ	PT	KT
4	2	3

6

- Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek/tahunan yaitu Renja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022 dan Perubahannya.
- Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu Rencana Aksi Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022, dan
- Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu DPA Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya.

b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja

- Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan/ditetapkan yaitu: Renstra beserta perubahannya, Renja beserta perubahannya, Rencana Aksi, dan DPA beserta perubahannya;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu yaitu bukti upload tanggal 7 Maret 2023 pada aplikasi esr.menpan.go.id diantaranya: PK eselon III, LKJ Tahun 2022, Rencana Aksi 2022, Cascading, Pohon Kinerja, Renja 2022, IKU 2021-2026, Renstra 2021-2026;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai yaitu perjanjian kinerja Pimpinan Perangkat Daerah (Eselon III) sudah diturunkan pada unit kerja s/d Eselon IV melalui diagram pohon kinerja;
- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra sudah sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah, sebagaimana berikut:

Tujuan	Menyelenggarakan Kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi
	Menwujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan
	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman rumah
	Terselenggaranya Penataan bangunan gedung
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Sasaran	Pengembangan jasa konstruksi
	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi marlap
	Seluruhnya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengaliran lainnya
	Penurunan lingkungan rumah
	Meningkatnya penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal aset
	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi

- Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART yaitu target kinerja pada dokumen perencanaan Renstra dan Renja sudah masuk dalam kriteria SMART (specific) jelas tujuannya, measurable memiliki indikator yang dapat diukur, achievable bisa tercapai, relevan sesuai dengan visi/misi/tujuan, Perangkat Daerah, time bond/terdapat target waktu yang jelas), sebagaimana berikut:

No	KASUS/STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN/SASARAN KINERJA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi marlap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi marlap	%	79,60	83,23	85,32	87,83	90,02
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu	%	39,38	46,81	63,45	75,48	87,52

MPJ	PT	KT

7

1	Penurunan Lingkungan Rumah	Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Lingkungan Rumah	%	81,04	80,01	80,18	84,90	88,23
				185	172	180	148	136
2	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal aset	Prosedur standar layanan dengan akses berdasarkan lahan terdapat air minum layak perkotaan dan pedesaan	%	76,06	79,08	85,92	89,09	87,50
3	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi	%	-	29,00	37,50	37,50	37,50
4	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang telah di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	40,00	47,00	54,00	61,00	68,00

- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable) tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis) yaitu IKU selaras dengan tujuan dan sasaran setiap dokumen Renstra dan Renja serta IKU tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Renstra Tahun 2021-2026;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis yaitu target minimal yang ditetapkan pada Renja sesuai dengan Renstra;
- Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) yaitu diagram Cascading telah menunjukkan kesinambungan antara tujuan dengan sasaran dan antara organisasi dengan unit kerja;
- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- Setiap unit kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yaitu pegawai eselon 3-4 dan seluruh pegawai fungsional dan struktural telah membuat perencanaan kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK); dan
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yaitu Pegawai struktural, fungsional, dan staf menetapkan SKP atau PK yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai komitmen dalam pencapaian target kinerja.

c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai yaitu pada DPA Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022 jumlah anggaran sebesar Rp626.414.533.884,00 dengan jumlah 16 program, 27 kegiatan;
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai yaitu Rencana Aksi telah memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track yaitu target triwulan dalam Rencana Aksi sesuai dengan target setiap triwulan yang telah ditetapkan pada Renja;

MPJ	PT	KT

8

4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan pada monev triwulan 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan realisasi setiap triwulan dan dokumen monev ditandatangani pejabat terkait.
5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang dilakukan dan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yaitu langkah perbaikan kinerja terluang di Renja.
6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik yaitu Renja memuat target kinerja yang lebih baik.
7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu Eselon 3 dan 4 telah membuat PK sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran.
8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu Setiap pegawai membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran.

II. Pengukuran Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu SOP Mekanisme Pengumpulan data Kinerja Nomor 067/2479/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yaitu IKU, Renstra, Renja, PK, dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020; dan
3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu SOP Nomor 067/2479/VIII/2022 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja

1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja yaitu terdapat lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah;
2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan yaitu terdapat sumber data pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKJ Unit Kerja;
3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan yaitu ada data capaian kinerja realisasi fisik dan keuangan serta formulasi perhitungan capaian kinerja sesuai dengan IKU;
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu terdapat jadwal, notulensi dan dokumentasi pengukuran kinerja triwulan;
5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yaitu terdapat laporan monev triwulan 1, 2, 3, dan 4 disertai dengan daftar hadir dan diketahui oleh pimpinan Perangkat Daerah;
6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu aplikasi <http://simanap.jambiprov.go.id> aplikasi SKP Online (<http://skp.jambiprov.go.id>), SIPD Kemendagri (<https://sipd.kemendagri.go.id>), Aplikasi <http://paket.jambiprov.go.id>;
7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

WPJ	PT	KT

9

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (perbaikan/pengurangan) fungsi kinerja/penghasilan yaitu Peraturan Gubernur Jambi Nomor 271/KEP.GUB/BKD-5.1/2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional yaitu terdapat Pergub/Kepegub mengenai penempatan/penghapusan jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kinerja pegawai;
3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocussing) Organisasi yaitu dokumen perencanaan kinerja mengalami pergeseran atau perubahan (Renja Perubahan) terdapat penyesuaian dalam target;
4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja yaitu hasil Monev Triwulan menginformasikan realisasi kinerja, faktor hambatan dan solusi serta rekomendasi perbaikan;
5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja yaitu Kepala Perangkat Daerah membuat penyesuaian kebijakan dengan terbitnya Renja Perubahan yang telah diformalkan;
6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja yaitu terdapat perubahan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja yaitu terdapat perubahan atau penyesuaian anggaran berdasarkan Renja Perubahan dan hasil pengukuran kinerja pada Monev Renja Triwulan;
8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yaitu LKJ menginformasikan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan;
9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yaitu Monev Renja Triwulan memberikan informasi faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan; dan
10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yaitu SKP bulanan setiap pegawai memberikan laporan pengukuran kinerja bulanan yang memberikan informasi mengenai target dan realisasi capaian kinerja setiap bulan.

III. Pelaporan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 telah disusun;
2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yaitu LKJ telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan disertai stempel Perangkat Daerah;
4. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan yaitu bukti upload tanggal 7 Maret 2023 pada aplikasi esr.menpan.go.id dan tanggal 1 Maret pada Aplikasi 2023 pada aplikasi bappeda.jambiprov.go.id; dan
5. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu yaitu Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Cq. Biro Organisasi Nomor: S-002/PUPR-1.2/2023 Tanggal 9 Januari 2023 hal Penyampaian LKJ Tahun 2022.

b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar yaitu penyusunan LKJ sesuai dengan PermennPANRB Nomor 53 Tahun 2014

WPJ	PT	KT

10

- tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yaitu pada bab III LKJ telah menyajikan capaian Kinerja;
 - Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
 - Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
 - Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan;
 - Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan
 - Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

c. Kualitas Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) yaitu penetapan LKJP dan Monev selalu dihadiri dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai yaitu LKJP memberikan informasi target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja dan anggaran yang tertera pada PK;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yaitu LKJP memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sudah sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan, dan kegiatan;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yaitu LKJP menyajikan informasi keuangan/anggaran (target dan realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK Pejabat Eselon, Fungsional, dan Struktural;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yaitu LKJP menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya yaitu terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja berjalan; dan
- Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yaitu seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen dan adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen serta adanya rekomendasi atas kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian.

IV. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi Pemanfaatan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118/KEP.GUB/ITPROV-4/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi;

WPJ	PT	KT

11

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/Perangkat Daerah yaitu terdapat rekapitulasi Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yaitu Proses monev dilakukan secara bottom up.

b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar yaitu SK Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkup Dinas PUPR Daerah Provinsi Jambi Nomor 034/KEP.DINAS/PUPR.1/2022 dan SOP Nomor 001/TU-PH-MS.PH/PUPR/2022 tentang SOP Mekanisme Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dengan bukti sertifikat Bimtek tentang Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu Monev Triwulan menginformasikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/Perangkat Daerah yaitu Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang di input pada monev harus sesuai dengan PK (JPT Pratama, Administrator, Pengawas/latu yang disetarakan beserta 1 orang pegawai) yang telah disetujui/ditetapkan.

c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti yaitu rekomendasi perbaikan atas faktor hambatan pada Monev telah dilaksanakan dan ada peningkatan realisasi target pada Monev Triwulan berikutnya;
- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yaitu rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya (2021) telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

V. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya jalan Provinsi yang dalam kondisi Mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi Mantap	70,00%	77,36%	87,18%	Sangat Tinggi
2	Berkurangnya anggaran yang terdapat dalam anggaran	Persentase tercapainya kualitas pengendalian SOA	39,36%	30,68%	77,99%	Tinggi

WPJ	PT	KT

12

	perjanjian kinerja	terpeta pada tahun berjalan	91,04%	79,05%	98,28%	Sangat Tinggi
3	Penurunan Limbungan Kumuh	Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Limbungan Kumuh	185 Ha	13,50 Ha	7,51%	Sangat Rendah
4	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal access	Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	70,08%	70,80%	78,89%	Tinggi
5	Pemetaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Keperluan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi	-	100%	100%	Sangat Tinggi
6	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	40%	45%	100%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	91,6%	100%	Sangat Tinggi

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran kertas kerja perhitungan capaian kinerja;
- 2) Menyusun Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja yang smart pada level staf; dan
- 3) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Implementasi SAKIP pada Dinas PUPR Provinsi Jambi menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah 71,70 'Sangat Baik' dengan Predikat 'BB'.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan komponen/sub komponen dan bobot penilaian AKIP pada Kertas Kerja Evaluasi sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja perkomponen dengan tahun sebelumnya.

WPJ	PT	KT
✓	✓	✓

13

b. Saran

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan merupakan tanggung jawab pimpinan. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja yang dipimpinnya sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi dan diharapkan meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas unit kerja sehingga Laporan Kinerja unit kerja lebih baik pada tahun yang akan datang, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



WPJ	PT	KT
✓	✓	✓

14

b. Saran

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan merupakan tanggung jawab pimpinan. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja yang dipimpinnya sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi dan diharapkan meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas unit kerja sehingga Laporan Kinerja unit kerja lebih baik pada tahun yang akan datang. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA
Pembina Utama Madya
NIP. 19690819 199703 1 004

WPLJ	PF	KT

14

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022
PROGRES PERBAIKAN IMPLEMENTASI SAKIP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA TAHUN 2023**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran kertas kerja perhitungan capaian kinerja	Telah ditambahkan lampiran kertas kerja perhitungan capaian kinerja pada Laporan Kinerja tahun 2022	1 Laporan	28 Juli 2023	Dinas PUPR Provinsi Jambi	Selesai
2	Menyusun Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja yang smart pada level staf	Telah disusun Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja yang smart	9 bidang	28 Juli - 31 Juli 2023	Dinas PUPR Provinsi Jambi	Selesai tanggal 31 Juli 2023
3	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Telah dilakukan optimalisasi penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	1 aplikasi	28 Juli 2023	Dinas PUPR Provinsi Jambi	Selesai

Lampiran 5. Penghargaan yang Pernah Diterima





DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN:

PENGHARGAAN

KEPADA:

KEMAS ABDUL SOMAD
(PROVINSI JAMBI)

SEBAGAI:

JUARA III

INDIVIDU TINGKAT NASIONAL LOMBA TENAGA KERJA KONSTRUKSI
(JABATAN KERJA: TUKANG PASANG UBIN)

Jakarta, 3 November 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA



DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN:

PENGHARGAAN

KEPADA:

SUHARDI
(PROVINSI JAMBI)

SEBAGAI:

JUARA II

INDIVIDU TINGKAT NASIONAL LOMBA TENAGA KERJA KONSTRUKSI
(JABATAN KERJA: TUKANG PASANG BATA)

Jakarta, 3 November 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA



DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN:

PENGHARGAAN

KEPADA:

M. BADRUL MUNIR
(PROVINSI JAMBI)

SEBAGAI:

JUARA II

INDIVIDU TINGKAT NASIONAL LOMBA TENAGA KERJA KONSTRUKSI
(JABATAN KERJA: TUKANG RANGKA BAJA RINGAN)

Jakarta, 3 November 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



RACHMAN ADIEF DIENAPUTRA





GOVERNOR JAMBI

GOVERNOR JAMBI

NOMOR 1067 /KEP.GUB/DPAD-5.1/2023

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

GOVERNOR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan serta Peraturan Perundang-Undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Propinsi Jambi, dipandang perlu menetapkan Peringkat Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Peringkat Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Propinsi Jambi Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1067 /KEP.GUB/DPAD-5.1/2023
TENTANG PENETAPAN PERINGKAT NILAI
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI DAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023

PENETAPAN PERINGKAT NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Predikat
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	A (Memuaskan)
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi	A (Memuaskan)
5.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	A (Memuaskan)
6.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	A (Memuaskan)
7.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	A (Memuaskan)
8.	Inspektorat Provinsi Jambi	A (Memuaskan)
9.	Biro Hukum Setda Provinsi Jambi	A (Memuaskan)
10.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi	A (Memuaskan)
11.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	BB (Sangat Baik)
12.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	BB (Sangat Baik)
13.	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	BB (Sangat Baik)
14.	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	BB (Sangat Baik)
15.	Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	BB (Sangat Baik)
16.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	BB (Sangat Baik)
17.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi	BB (Sangat Baik)
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	B (Baik)
19.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi	B (Baik)
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi	B (Baik)
21.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	B (Baik)
22.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	B (Baik)
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	B (Baik)
24.	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi	B (Baik)

Lampiran 6. Lampiran Lembar Perhitungan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap	83,23%	78,99%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{78,99\%}{83,23\%} \times 100\% = 94,91\%$	
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	49,61%	49,04%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{49,04\%}{49,61\%} \times 100\% = 98,85\%$	
		Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	86,01%	62,80%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{62,80\%}{86,01\%} \times 100\% = 73,01\%$	
3	Penurunan Lingkungan Kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh	172 Ha	0 Ha	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{0 \text{ Ha}}{172 \text{ Ha}} \times 100 = 0 \text{ Ha}$	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi	25%	45%	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $\frac{45\%}{25\%} \times 100\% = 100\%$	
5	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, Perkotaan dan Perdesaan	79,08%	79,19%	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $\frac{79,19\%}{79,08\%} \times 100\% = 100\%$	
6	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	47%	47%	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $\frac{47\%}{47\%} \times 100\% = 100\%$	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Predikat AKIP	BB	BB	BB	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	91,3%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{91,3\%}{91.6} \times 100\% = 99,67\%$	

Lampiran 7. Lampiran Perhitungan Realisasi Kinerja Per Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat provinsi Jambi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	83,23	78,99	$\left(\frac{Realisasi}{Target} \right) * 100$ $\left(\frac{78,99\%}{83,23\%} \right) * 100$ $= 94,91\%$
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya.	49,61	49,04	$\left(\frac{Realisasi}{Target} \right) * 100$ $\left(\frac{49,04}{49,61} \right) * 100$ $= 98,85$
		Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	86,01	62,80	$\left(\frac{Realisasi}{Target} \right) * 100$ $\left(\frac{62,80}{86,01} \right) * 100$ $= 73,01\%$

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
3	Penurunan Lingkungan kumuh	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh	172 Ha	0 Ha	$\left(\frac{Realisasi}{Target} \right) * 100$ $\left(\frac{0 \text{ Ha}}{172 \text{ Ha}} \right) * 100$ $= 0 \text{ Ha}$
4.	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi	25%	45%	$\left(\frac{Realisasi}{Target} \right) * 100$ $\left(\frac{45 \%}{25 \%} \right) * 100$ $= 100\%$
5.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	79,08	79,19	$\left(\frac{Realisasi}{Target} \right) * 100$ $\left(\frac{79,19}{79,08} \right) * 100$ $= 100\%$

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
6.	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	47,00%	47,00%	$\left(\frac{Realisasi}{Target} \right) * 100$ $\left(\frac{47.00}{47.00} \right) * 100$ $= 100\%$

Lampiran 8. Lampiran Perhitungan Realisasi Anggaran Belanja Per Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran			Efisiensi
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi(%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	434,160,073,389	428,973,705,700	$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}}\right) * 100$ $\left(\frac{428,973,705,700}{434,160,073,389}\right) * 100$ $= 98,81\%$	$100\% - \text{Realisasi} = 100\% - 98,81\% = 1,19\%$
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	26,365,369,420	25,974,331,191	$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}}\right) * 100$ $\left(\frac{25,974,331,191}{26,365,369,420}\right) * 100$ $= 98,52\%$	$100\% - \text{Realisasi} = 100\% - 98,52\% = 1,48\%$

		Persentase Luas Baku daerah irigasi yang terairi	35,788,503,618	34,137,651,842	$\left(\frac{Realisasi}{Pagu}\right) * 100$ $\left(\frac{34,137,651,842}{35,788,503,618}\right) * 100$ $= 95,39\%$	$100\% - Realisasi = 100\% - 95,39\% = 4,61\%$
3	Penurunan lingkungan kumuh	Persentase Penurunan Jumlah Kawasan permukiman kumuh	14,008,357,648	13,987,340,745	$\left(\frac{Realisasi}{Pagu}\right) * 100$ $\left(\frac{13,987,340,745}{14,008,357,648}\right) * 100$ $= 99,85\%$	$100\% - Realisasi = 100\% - 99,85\% = 0,15\%$
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi	170,928,195,099	170,250,825,057	$\left(\frac{Realisasi}{Pagu}\right) * 100$ $\left(\frac{170,250,825,057}{170,928,195,099}\right) * 100$ $= 99,60\%$	$100\% - Realisasi = 100\% - 99,60\% = 0,40\%$

5.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	1,829,490,000	1,698,790,805	$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \right) * 100$ $\left(\frac{1,698,790,805}{1,829,490,000} \right) * 100$ $= 92,86\%$	$100\% - \text{Realisasi} = 100\% - 92,86\% = 7,14\%$
6.	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	4,771,025,256	4,624,464,965	$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \right) * 100$ $\left(\frac{4,624,464,965}{4,771,025,256} \right) * 100$ $= 96,93\%$	$100\% - \text{Realisasi} = 100\% - 96,93\% = 3,07\%$

Lampiran 9. Lampiran Perhitungan Analisis Efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	94,91%	98,81%	$\left(\frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\text{Penyerapan Anggaran}} \right) * 100\%$ $\left(\frac{94,91\%}{98,81\%} \right) * 100\%$ $= 96,05\%$
2.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	98,85%	98,52%	$\left(\frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\text{Penyerapan Anggaran}} \right) * 100\%$ $\left(\frac{98,85\%}{95,52\%} \right) * 100\%$ $= 100,33\%$
		Persentase Luas Baku daerah irigasi yang terairi	73,01%	95,39%	$\left(\frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\text{Penyerapan Anggaran}} \right) * 100\%$ $\left(\frac{73,01\%}{95,39\%} \right) * 100\%$ $= 76,54\%$
3.	Penurunan Lingkungan Kumuh	Persentase Penurunan Jumlah Kawasan permukiman kumuh	0 Ha	99,85%	$\left(\frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\text{Penyerapan Anggaran}} \right) * 100\%$ $\left(\frac{0}{99,85\%} \right) * 100\%$ $= 0\%$

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis Provinsi	100%	99,60%	$\left(\frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\text{Penyerapan Anggaran}} \right) * 100\%$ $\left(\frac{100\%}{99,60\%} \right) * 100\%$ $= 100,40$
5.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	100%	92,86%	$\left(\frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\text{Penyerapan Anggaran}} \right) * 100\%$ $\left(\frac{100\%}{92,86\%} \right) * 100\%$ $= 107,69\%$
6.	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100%	96,93%	$\left(\frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\text{Penyerapan Anggaran}} \right) * 100\%$ $\left(\frac{100\%}{96,93\%} \right) * 100\%$ $= 103,17\%$